

J A M – E K I S

JURNAL ILMIAH AKUNTANSI, MANAJEMEN, & EKONOMI ISLAM

Pelindung : Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB)

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMB

Ketua Dewan Redaksi : Dr. Meilaty Finthariasari, M.M

Sekretaris Dewan Redaksi : Marini, S.E., M. EK

Dewan Redaksi :

1. Prof. Lizar Alfansi, Ph.D
2. Dr. Arfan Ikhsan
3. Karona Cahya Susena, S.E., M.M
4. Dr. Afi Parnawi
5. Dr. Willy Abdilla
6. Dr. Rumanintya Lisaria Putri, S.E., M.M
7. Dr. Mochammad Arif Budiman, S. Ag., M.E.I., CIRR., CIIQA
8. Dr. Sugiyanto. S.Sos. MM
9. Dr. Arfan Ikhsan, M.Si
10. Dr. Asep Risman
11. Dr. Nurlaila, S.E., MA., CMA
12. Dr. Fachruzzaman
13. Dr. Onsardi, M.M
14. Dr. Nizwan Zukri

Executive Editors : 1. Dr. Muhammad Kristiawan
2. Berto Usman, Ph.D

Dewan Editor : 1. Marliza Ade Fitri, S.E., M.M
2. Yulius Wahyu Setyadi, M.M
3. Diah Khoiriah, M.Acc
4. Tezar Arianto, M.M

Secretariat and Administration : 1. Ade Tiara, M.M
2. Merta Kusuma, M.M

SEMUA TULISAN YANG ADA DALAM JURNAL PENELITIAN INI BUKAN
MERUPAKAN CERMINAN SIKAP ATAU PENDAPAT DEWAN REDAKSI
TANGGUNGJAWAB TERHADAP ISI ATAU AKIBAT DARI TULISAN TETAP
TERLETAK PADA PENULIS

ALAMAT REDAKSI

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Kampus IV Jl. Adam Malik KM. 9, Sidomulyo, Gading Cempaka Bengkulu

DAFTAR ISI

DAMPAK PEMBATALAN KEBERANGKATAN HAJI PADA MASA PANDEMI DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA BENGKULU Annisa Fajriani Miti Yarmunida Idwal B	1-17
MANFAAT MEDIA DIGITAL DALAM PENGEMBANGAN PROMOSI PAKET UMRAH DI PT.AQM TOUR AND TRAVEL KOTA BENGKULU Oktari Pramudita Eka Sri Wahyuni Idwal B	18-29
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERASIPAN PROVINSI BENGKULU Furqonti Ranidiah Tezar Arianto	30-39
ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP MANFAAT BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA Sri Wahyuni Darmawan Sriyanto Novi Mutiara	40-52
HUBUNGAN PELATIHAN DENGAN KINERJA KARYAWAN Desy Setyorini Achmad Syahlani	53-62
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN TERHADAP CUSTOMER SATISFACTION NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) ARGAMAKMUR - BENGKULU Yunita Sri Lestari1 Asnaini Debby Arisandi	63-73
PENGARUH INOVASI PRODUK DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi Pada Konsumen Wardah Toko Lova Kota Bengkulu) Reni Indriani1 Desi Fitria Fatihatunnisa	74-86
ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI MENGGUNAKAN E-MONEY TERHADAP KEINGINAN MEMBELI Herlin Yanto Effendi Kiemas Kurniawan	87-98
PERAN FINANSIAL TEKNOLOGI TERHADAP DAYA SAING UMKM DI KOTA PANGKALPINANG SELAMA MASA PANDEMI COVID 19 Darus Altin Nanang Wahyudin Vebstasvili	99-114

JURNAL ILMIAH AKUNTANSI, MANAJEMEN, & EKONOMI ISLAM

- FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT.
INDOMACO ADI PRIMA KOTA BENGKULU 115-129
Sri Handayani
Andriyani Prawitasari
- ANALISIS RASIO CAR, ROA, ROE DAN BOPO TERHADAP KONDISI FINANCIAL
DISTRESS PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2019-2020 130-146
Annisa Chairina Lasa
Muhammad Haris Riyaldi
Teuku Muhammad Syahrizal
- ANALISIS MANAJMEN STRATEGI DALAM MENARIK MINAT BELI KONSUMEN
(Studi Pada Mini Market El-Jhon Pagar Dewa Kota Bengkulu) 147-157
Heryunda Afista
Fatimah Yunus
Kustin Hartini
- PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP
KINERJA PEGAWAI ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERASIPAN
PROVINSI BENGKULU 158-171
Meiffa Herfianti
Mimi Kurnia Nengsih
- STRATEGI PEMASARAN BISNIS FASTFOOD PALUPI CULINARY DALAM
MENINGKATKAN PENJUALAN (Studi Penelitian di Palupi Culinary Kota Bengkulu) 172-191
Sri Ekowati
Nabila Saufira
- PENGARUH GAJI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP LOYALITAS TENAGA
HONORER PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BENGKULU 192-203
Muhamad Galy Njoman Ari Pribowo
Deni Septadinata

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP MANFAAT BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT FOR BENEFITS FOR VILLAGE COMMUNITY WELFARE

Sri Wahyuni¹, Darmawan Sriyanto², Novi Mutiara³

¹⁻³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Kirana Medan

wahyuni060689@gmail.com¹, kbse_darmawan@yahoo.com²

Jalan Gajah Mada, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan

Corresponding email: wahyuni060689@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 21 Oktober 2022

Direvisi : 22 Januari 2023

Disetujui : 23 Januari 2023

Keywords:

Transparency, Accountability,
Village fund

Kata kunci:

Tranparancy, Akuntabilitas, Dana
Desa

ABSTRACT:

The purpose of this study is to determine the implementation of local government accountability, the implementation of the principles of accountability and transparency in government accountability and the constraints it faces, and to analyze the relationship between accountability and transparency in providing benefits to promote the welfare of village communities. Analytical methods were used to evaluate research variables, multi-scale models were used to increase the credibility and accuracy of measurements. A five-step Likert scale was used from strongly disagree to strongly agree. Questionnaires were built according to the objectives and research variables. The results of this study are expected to be an example of village fund management in improving the welfare of village communities in realizing accountability and transparency of all parties, be it the person in charge, implementer and even the community.

ABSTRAK:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintah daerah, implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah dan kendala yang dihadapi, serta menganalisis hubungan antara akuntabilitas dan transparansi dalam memberikan manfaat untuk mendorong kesejahteraan masyarakat desa. Metode Analisis digunakan untuk mengevaluasi

variabel penelitian, model multi-skala digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan akurasi pengukuran. Skala likert lima tahap digunakan dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Kuisisioner dibangun sesuai dengan tujuan dan variabel penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kesemua pihak baik itu penanggungjawab, pelaksana bahkan sampai ke masyarakat.

PENDAHULUAN

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang segala sektor di masyarakat. ADD merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa, untuk merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.

Tabel 1.

Rincian Dana Desa Kecamatan Sawit Seberang Tahun 2018

Nama Desa di Kecamatan Sawit Seberang	Klasifikasi Desa (IDM) Tahun 2018	Pagu Dana Desa Tahun 2018
Alur Gadung	Tertinggal	Rp 705.028.000,-
Simpang Tiga	Sangat tertinggal	Rp 692.118.000,-
Sei litur tasik	Tertinggal	Rp 731.370.000,-
Sawit Hulu	Tertinggal	Rp 748.038.000,-
Mekar Sawit	Berkembang	Rp 723.627.000,-
Alur Melati	Tertinggal	Rp 744.050.000,-

Sumber: PP Bupati Langkat No.4 Tahun 2018

Pemanfaatan ADD supaya mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan ketetapan undang-undang no 6 tahun 2014 penerimaan desa yaitu 30% untuk belanja operasional pemerintahan desa dan 70% untuk belanja publik dan tujuan kebijakan ADD belum diketahui oleh masyarakat selaku sasaran kebijakan karena kurangnya sosialisasi dari pembuat kebijakan itu sendiri. Proses pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan dana desa belum didukung dengan sumber daya yang cukup dan memadai sehingga menyebabkan pelaksanaan pengelolaan tidak dapat dilakukan secara optimal sebagaimana mestinya (Ranidiah & Arianto, 2020; Triharyati & Nursita, 2020) . Dari data diatas terdapat satu desa yang sangat tertinggal, empat desa yang tertinggal dan hanya satu desa yang berkembang padahal untuk dana yang diterima antara yang

berkembang dan yang tertinggal tidak jauh berbeda. Hal ini lah yang membuat peneliti ingin menganalisis lebih lanjut terkait dana desa tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintah daerah, implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah dan kendala yang dihadapi. Serta menganalisis hubungan antara akuntabilitas dan transparansi dalam memberikan manfaat untuk mendorong kesejahteraan masyarakat desa melalui indikator transparansi yakni kesediaan dan aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Selanjutnya indikator akuntabilitas yakni segala aktifitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat sebagai manifestasi tanggungjawab, aktifitas organisasi dilaksanakan dengan adil dan tidak merusak lingkungan sekitar, pelaksanaan ADD sesuai dengan aturan pemerintah. Penelitian ini sebagai ajang untuk melakukan penilaian dari sudut pandang masyarakat terkait pengelolaan dana desa yang dianalisis langsung oleh tenaga pengajar agar pemerintah desa khususnya di Kecamatan Sawit Seberang melakukan hal-hal yang kiranya dapat mendorong kesejahteraan masyarakat desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang no 4 tahun 2014, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan ADD adalah; mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa, mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan social, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa, meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa (Aziz, 2016).

Terdapat tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2018), yaitu :

1. Prinsip Transparansi atau Keterbukaan.

Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat.

2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-

benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip Value for Money

Prinsip ini diterapkan dalam tiga pokok proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif.

Karakteristik atau unsur utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), menurut (Nisjar S. Karhi, 1997) adalah akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openess*), dan aturan hukum (*rule of law*) ditambah dengan kompetensi manajemen (*managemen competence*) dan hak-hak asasi manusia (*human right*). Tidak jauh berbeda, (Widodo, 2001) menyebutkan ada empat unsur utama yaitu akuntabilitas (*accountability*), adanya kerangka hukum (*rule of law*), informasi dan transparansi.

Transparansi

Transparansi mengandung arti keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan atas suatu aktifitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2018). Tetapi secara ringkas dapat disebutkan bahwa, prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti :

- Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik,
- Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik,
- Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Indikator transparansi menurut (Kristianten, 2006) yakni kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Akuntabilitas

Akuntabilitas sebagai “pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu menurut Budiardjo (1998).” Akuntabilitas adalah sejauh mana seseorang harus bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi—hukum atau organisasi—untuk tindakan seseorang dalam masyarakat pada umumnya, atau khususnya pada dirinya sendiri didalam sebuah organisasi (Shafritz et al., 2017).

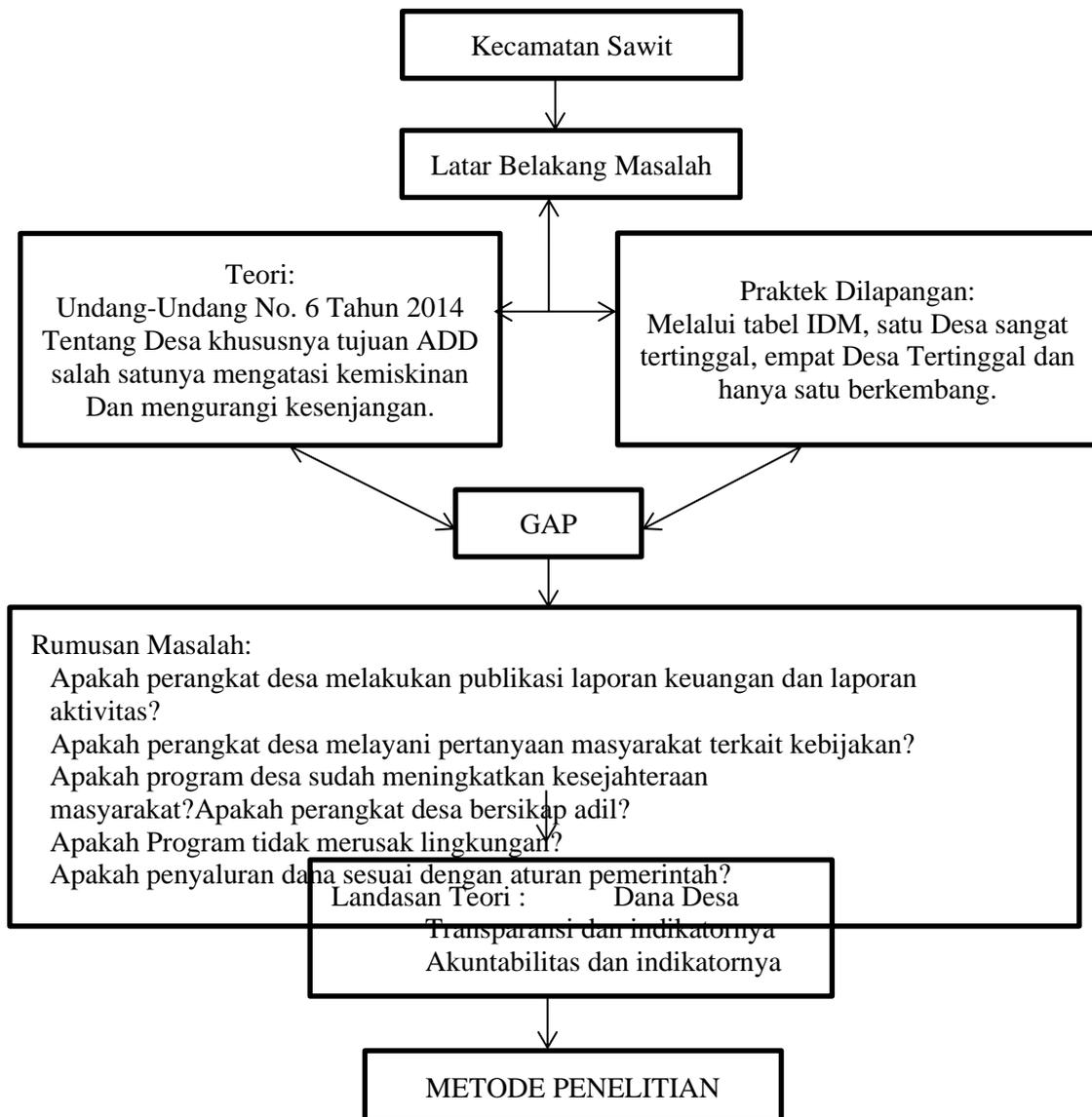
Indikator akuntabilitas menurut (Manan, 2002) adalah sebagai berikut :

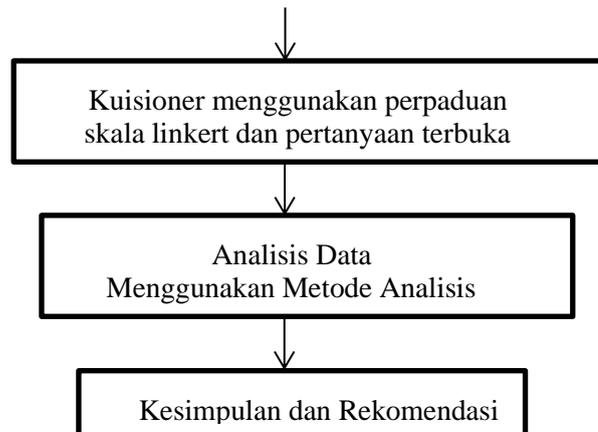
- Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga dan memenuhi standar administrasi yang berlaku.
- Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program
- Kejelasan dari tujuan yang ingin dicapai
- Kelayakan dan konsistensi dari target operasional
- Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

Akuntabilitas juga dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional, dan perspektif sistem akuntabilitas (Rinaldi, 2016). (Kewo, 2017) memaparkan bahwa “one of the standards in the use of good administration is accountability”, yang artinya bahwa salah satu standard yang digunakan dalam tertib administrasi adalah akuntabilitas. Kualitas Informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah secara langsung dan positif mempengaruhi akuntabilitas keuangan (Ramdhani et al., 2016).

METODE PENELITIAN

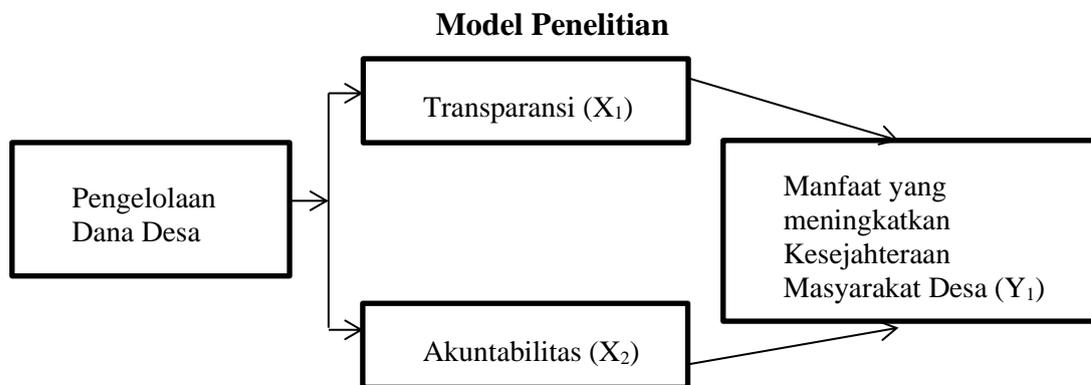
Kajian penelitian ini diterjemahkan penulis ke dalam satu kerangka konseptual, dimana dalam kerangka konseptual ini kerangka berpikir penulis dibuat ke dalam suatu alur yang sistematis dalam proses penelitian. Adapun alur penelitian dapat dilihat pada Gambar 5 berikut:





Gambar 1. Alur Penelitian

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber ke dua dan seterusnya. Data yang digunakan merupakan data time series dari tahun 2017-2021 sebagai berupa data penerimaan ADD Kecamatan Sawit Seberang. Penelitian ini menggunakan data primer dengan mengambil sampel acak berjumlah 180 responden di enam desa yang ada di Kecamatan Sawit Seberang.



Gambar 6. Model Penelitian

Hipotesis dalam Penelitian ini adalah:

H ₁	Ada pengaruh langsung antara transparansi pengelolaan dengan manfaat yang mendorong kesejahteraan masyarakat desa
H ₂	Ada pengaruh langsung antara akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan manfaat yang mendorong kesejahteraan masyarakat desa
H ₃	Ada pengaruh langsung antara transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

dana desa dengan manfaat yang mendorong kesejahteraan masyarakat desa secara simultan.

Tabel 2
Variabel Operasional dan Pengukuran

Variabel Definisi	Dimensi	Indikator	Pengukuran
Transparansi (Variabel Bebas, X ₁)	Organisasi bersifat terbuka (informasi mudah diakses). Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap. Kebijakan perusahaan harus dikomunikasikan kepada pemberi amanah.	<ul style="list-style-type: none"> – Laporan keuangan – Publikasi laporan aktivitas Pengkomunikasian – Kebijakan kepada masyarakat 	Skala Ordinal
Akuntabilitas (Variabel bebas, X ₂)	Segala aktifitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat sebagai manifestasi tanggungjawab. Aktifitas organisasi dilaksanakan dengan adil. Aktifitas organisasi tidak merusaklingkungan sekitar. Pelaksanaan ADD sesuai dengan aturan pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> – Program Desa yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat – Sikap adil – Program tidak merusaklingkungan – Penyaluran sesuai aturanpemerintah 	Skala Ordinal
Kesejahteraan Masyarakat (Y)	Dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang terhadap sesuatu aktivitas agar dapat diterima dan diakui oleh lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> – Dorongan dalam diri individu – Motif sosial Faktor emosional 	Skala Ordinal
Dana Desa yang dikelola	Program yang berfokus pada pendayagunaan agar bisa mengurangi kemiskinan Bantuan disalurkan dalam bentuk pelatihan dan keterampilan untuk membentuk kemandirian ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> – Fokus program Pendayagunaan dana 	Skala Ordinal

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan SPSS 20, maka diperoleh hasil persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,71 + 0,381X1 + 0.608 X2 + e$$

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,701	1,638		,428	,669
	TRANSPARANSI (X1)	,381	,049	,363	7,752	,000
	AKUNTABILITAS (X2)	,608	,047	,605	12,932	,000

a. Dependent Variable: PENGELOLAAN DANA DESA

1) Hubungan antara Transparansi dan Pengelolaan dana desa

Untuk melihat apakah ada pengaruh langsung antara transparansi pengelolaan danadesa dengan manfaat yang mendorong kesejahteraan masyarakat desa.

H0: Tidak ada pengaruh langsung antara transparansi dan pengelolaan dana desa,

H1: Ada pengaruh langsung antara transparansi dan pengelolaan dana desa.

Hasil penghitungan SPSS diperoleh angka t penelitian sebesar 7.752.

besarnya angka t tabel dengan ketentuan sebagai berikut taraf signifikansi 0,05 dan Nilai T table = $(\alpha/2;n-k-1)$, = $0,05/2; 180-2-1 = 0,025; 177 = 1,97346$

t penelitian > t table = $7,752 > 1,97346$

Uji hipotesisnya, Jika t penelitian > t tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima.

Jika t penelitian < t tabel, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Artinya, ada pengaruh langsung antara transparansi dengan pengelolaan dana desa. Besarnya pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa sebesar 0,363 atau 36,3%.

2) Hubungan antara Akuntabilitas dan Pengelolaan dana desa

Untuk melihat apakah ada pengaruh langsung antara akuntabilitas pengelolaan danadesa dengan manfaat yang mendorong kesejahteraan masyarakat desa.

H0: Tidak ada pengaruh langsung antara akuntabilitas dan pengelolaan dana desa,

H1: Ada pengaruh langsung antara akuntabilitas dan pengelolaan dana desa.

Hasil penghitungan SPSS diperoleh angka t penelitian sebesar 12,932. besarnya angka t tabel dengan ketentuan sebagai berikut taraf signifikansi 0,05 dan Nilai T table = $(\alpha/2;n-k-1)$, = 0,05/2; 180-2-1 = 0,025; 177 = 1,97346
 $t \text{ penelitian} > t \text{ table} = 12,932 > 1,97346$

Uji hipotesisnya, Jika $t \text{ penelitian} > t \text{ tabel}$, maka H0 ditolak dan H1 diterima.

Jika $t \text{ penelitian} < t \text{ tabel}$, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Artinya, ada pengaruh langsung antara akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan manfaat yang mendorong kesejahteraan masyarakat desa.. Besarnya pengaruh 0,605 atau 60,5%.

3) Uji F Simultan (Hubungan antara transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan manfaat yang mendorong kesejahteraan masyarakat)

Untuk melihat apakah ada pengaruh langsung antara transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan manfaat yang mendorong kesejahteraan masyarakat desa secara simultan. Hasil pengujian statistic F (uji simultan) pada variabel transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan manfaat yang mendorong kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	973,879	2	486,939	185,978	.000 ^b
Residual	463,433	177	2,618		
Total	1437,311	179			

Hipotesisnya sebagai berikut:

H0 : Tidak ada pengaruh langsung antara transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan manfaat yang mendorong kesejahteraan masyarakat.

H1 : Ada pengaruh langsung antara transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan manfaat yang mendorong kesejahteraan masyarakat.

Pengujian dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan membandingkan besarnya angka F penelitian dengan F tabel. Cara kedua yaitu dengan membandingkan angka taraf signifikansi (sig) hasil perhitungan dengan taraf signifikansi 0,05 (5%).

Menggunakan cara pertama atau membandingkan besarnya angka F penelitian dengan F tabel. Caranya sebagai berikut:

Pertama: Menghitung F penelitian

F penelitian dari SPSS didapatkan sebesar 195,978

Kedua: Menghitung F tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

Nilai Ftabel = $f(k; n-k)$, $F=(2;180-2)$, $F_{tabel}=(2;178)=3,05$ dengan tingkat kesalahan 5% (0,05).

Berdasarkan tabel diatas nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ dan

Jika F penelitian $> F$ tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima.

Jika F penelitian $< F$ tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak.

Fhitung 185,987 > Ftabel 3,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain Ada pengaruh langsung antara transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan manfaat yang mendorong kesejahteraan masyarakat.

4) Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi (R²) pada intinya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.823 ^a	.678	.674		1,618

a. Predictors: (Constant), AKUNTABILITAS (X2) , TRANSPARANSI (X1)

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan hasil uji koefien determinasi dari kebutuhan variabel memperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,678, yang berarti bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa sebesar 67,8 %. Sedangkan sisanya sebesar 32,2 % dijelaskan oleh variable lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Dalam rangka memberikan informasi mengenai pengaruh transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) terhadap pengelolaan dana desa (Y), maka peneliti telah melakukan penelitian tersebut melalui 180 responden. Penelitian tersebut dilakukan oleh peneliti guna menjawab permasalahan dengan judul “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Manfaat Bagi Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa-Desa di Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara)” berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dengan menggunakan SPSS 20, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “Transparansi berpengaruh langsung terhadap pengelolaan dana desa”, terbukti bahwa transparansi mempunyai pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi variabel transparansi sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai thitung sebesar 7,752 > ttabel 1,97346, dapat disimpulkan bahwa

H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh langsung dan signifikan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Weny Ultafiah (2017), yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan *Good Governance* Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat”, menyatakan bahwa transparansi

berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di karenakan pengelolaan keuangan dana desa tanpaadanya keterbukaan pemerintah desa terkait dana desa akan menimbulkan *fraud* yang mengakibatkan kekacauan penatausahaan pelaporan pertanggungjawaban keuangandana desa. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dilakukan oleh (Sukmawati, 2019) yang berjudul Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut), menyatakan bahwa prinsip transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Sawit Seberang sudah terbuka kepada masyarakat, khususnya dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut didukung dengan jawaban responden yang menjawab setuju dan sangat setuju pada setiap indikator pertanyaan yang disediakan. Banyak responden yang mengakui bahwa pemerintah Desa sudah transparan mengenai pengelolaan dan desa hal ini dibuktikan dengan adanya penyediaan informasi di papan pengumuman atau baliho mengenai program yang akan dilakukan dan anggarannya beserta realisasiprogramnya.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis kedua menyatakan “ Akuntabilitas berpengaruh langsung terhadap pengelolaan dana desa”, terbukti bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi variabel akuntabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai thitung sebesar $12,932 > t_{tabel} 1,97346$, maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Artinya terdapat pengaruh langsung dan signifikan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alqodri, 2015) yang berjudul Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pemerintahan Kota Dumai), menyatakan bahwa prinsip akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa, dengan adanya prinsip akuntabilitas segala aktivitas yang dilakukan oleh aparatur desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faridah (2015) yang berjudul Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBDes), menunjukkan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa yang baik adalah pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Sawit Seberang. Hal itu di perkuat dari banyaknya jawaban setuju dan sangat setuju dari responden pada setiap item indikator. Adapun adanya pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa karena pemerintah desa sebagai entitas telah merealisasikan prinsip akuntabilitas diantaranya telah melaksanakan pelaporan yang sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban dan kepatuhan terhadap standar

pelaporan.

Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Dari hasil uji F (Simultan) yang menguji pengaruh seluruh variable independen (transparansi dan akuntabilitas) terhadap variabel dependen (pengelolaan dana desa) bahwa secara bersama-sama kedua variable bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel bebas dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai Fhitung $185,987 > F_{tabel} 3,05$, yang berarti H_3 diterima. Jadi kesimpulannya adalah transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, yang bermakna jika semakin baik transparansi dan akuntabilitas maka pengelolaan dana desa juga akan semakin baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Weny, 2017) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan *Good Governance* Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat yang menyatakan bahwa secara parsial signifikan mempengaruhi pengelolaan dana desa, adapun variabel akuntabilitas, partisipasi, transparansi secara signifikan mempengaruhi pengelolaan dana desa sehingga mewujudkan *good governance* di desa Kecamatan Merapi Barat. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Risyia Umami (2017) yang berjudul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Hasil penelitian ini menyatakan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa enam Desa yang ada di Kecamatan Sawit Seberang sudah melakukan pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel terlihat dari jawaban responden yang menjawab setuju dan sangat setuju dari indikator pertanyaan serta wawancara langsung kepada masyarakat desa di Kecamatan Sawit Seberang dan melihat langsung program-program yang dilaksanakan di setiap desa di Kecamatan Sawit Seberang.

Penelitian ini juga menjawab pertanyaan peneliti terkait IDM (Indeks Desa Membangun) yang telah dipaparkan di latar belakang, bahwa memang ada desa-desa yang tercatat Sangat Tertinggal karena mereka berada di wilayah perkebunan, dimana pembangunan tidak bisa dilakukan, sebagian besar wilayah tersebut dikuasai oleh perusahaan perkebunan, hal ini yang menyebabkan adanya ketimpangan pembangunan untuk wilayah pedesaan tersebut. Karena adanya regulasi pemerintah tidak bisa ikut campur. Ada banyak indikator untuk menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan manfaat mendorong kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa maka semakin bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program-program yang dilaksanakan sesuai dengan indikator transparan dan akuntabel.

DAFTAR RUJUKAN

Alqodri, M. (2015). Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan & Penyajian Laporan

- Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pemerintahan Kota Dumai). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 1–15.
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211.
- Kewo, C. L. (2017). The influence of internal control implementation and managerial performance on financial accountability local government in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(1), 293–297.
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta.
- Manan, B. (2002). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. FSH UII Press.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI.
- Nisjar S. Karhi. (1997). Beberapa Catatan tentang "Good Governance. *Jurnal Administrasi Dan Pembangunan*, 1(2), 119.
- Ramdhani, D., Fadli, A., Virgina, C., & Pohan, E. (2016). The Organization, Accountability and Performance of Public Organization. *Proceeding: The 2Nd International Conference on Business Management*, 1(3), 118–133.
- Ranidiah, F., & Arianto, T. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (Studi Empiris Bank Syariah " Badan Usaha Milik Negara " Di Indonesia Periode 2015-2018)". *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 3(1). <https://doi.org/10.36085/jam-ekis.v3i1.541>
- Rinaldi, R. R. (2016). *Pengaruh Penerapan Good Governance, Audit Kinerja dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Shafritz, M, J., & Russel, E. W. (2017). *Introducing Public Administration*.
- Sukmawati, F. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal Dan Umkm*, 2(1).
- Triharyati, E., & Nursita, E. (2020). Kajian Penerapan Akuntansi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Laba Rugi Dan Neraca Di Pt. Bpr Sindang Binaharta Kota Lubuklinggau. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 3(1).
- Weny, U. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat*. 1(1), 1–14.
- Widodo, J. (2001). *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi daerah*. Insan Cendikia.